



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 08 SEPTEMBER 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

22 Dapur MBG Tak Punya Sertifikat Higiene Sanitasi

Pemkab Desak Izin Segera Diurus

SIDOARJO - Persoalan perizinan masih membayangi operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Delta. Sebanyak 22 dari 170 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemkab Sidoarjo mendorong pengelola dapur segera melengkapi persyaratan yang masih kurang.

Pih Sekda Sidoarjo Mohammad Alnur Rohman mengatakan, pemkab tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional dapur MBG yang belum mengantongi SLHS. Kewenangan tersebut berada di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instansi yang menaungi program MBG.

"Kami tidak bisa menghentikan karena itu kewenangan BGN. Namun, kami mendorong SPGP segera memenuhi persyaratan," katanya kemarin (7/9). Menurut Alnur, pengelola perlu menyempurnakan pemenuhan fasilitas sanitasi sebelum proses perizinan dilanjutkan. Setelah fasilitas dinyatakan memenuhi persyaratan, pengelola juga harus melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan SLHS.



KENA SANKSI: SPGP Kalitengah ditup sementara setelah kasus keracunan massal. Penyaluran MBG dialihkan ke dapur lain.

Jumlah	Belum berizin	Belum mengantongi SLHS
170 SPGP	31 SPGP	22 SPGP

Alnur mengatakan, pemkab mendorong seluruh proses perizinan segera dituntaskan. Terkait batas waktu penyelesaian persyaratan, pihaknya masih berkoordinasi dengan BGN. "Kami siap membantu dari sisi pendampingan. Jangan sampai pengelola tidak tahu kekurangannya," ujarnya.

Evaluasi Seluruh SPGP

Di sisi lain, persoalan perizinan SPGP juga menjadi sorotan DPRD Sidoarjo. Dari total 170 SPGP yang beroperasi, sebanyak 31 di antaranya disebut belum mengantongi izin. Pemkab telah mengevaluasi perizinan seluruh SPGP yang beroperasi.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Muhammad Dahmon Chudhori menilai pengelola

tem pengawasan keamanan pangan yang diterapkan. DPRD mendesak BGN bersama Satgas SPGP mengevaluasi seluruh dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan.

"Dapur yang masih bermasalah diminta tidak dipaksakan beroperasi sebelum memenuhi standar yang ditetapkan," kata Dahmon.

Evaluasi tersebut terutama menyipikan kebersihan dan higienitas dapur, kelayakan fasilitas, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sumber air, pendingin, tenaga pendukung, serta SOP produksi. (ful/hen)



Mohammad Alnur Rohman
Pih Sekda Sidoarjo

Penyaluran Makanan untuk 19 Lembaga Dialihkan

SPGP Kalitengah, Tanggulangin, ditup setelah keracunan massal di Ponges Manba'ul Hikmah. Pemkab memastikan program MBG untuk 19 lembaga yang sebelumnya disuplai SPGP akan tetap berjalan. Distribusi bakal dialihkan ke dapur MBG lain.

"Rencananya memang dialihkan. Sekarang masih proses komunikasi," kata Pih Sekda Sidoarjo Mohammad Alnur Rohman. Dia menjelaskan, pemkab akan mendata kebutuhan MBG di 18 sekolah dan mencocokkannya dengan kapasitas SPGP lain. Langkah itu dilakukan untuk memastikan SPGP pengganti yang bisa menyuplai MBG selama Kalitengah ditup sementara.

Pengasuh Ponges Manba'ul Hikmah KH Abdul Wahid Harun mengatakan, ada evaluasi terkait MBG setelah keracunan. Dia mengusulkan, program MBG ditangani instansi ponges. "Kami terpancut, tapi fokus saat ini



TERTIB: Babe Haikal memberikan keterangan soal pemastian produk halal impor di Gedung BPJPH, Jakarta, Sabtu (5/9).

Atur Kepastian Halal Produk Impor untuk Lindungi Konsumen

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2026. Yaitu, tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemastian produk halal luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 telah melalui serangkaian pembahasan dan dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penyusunannya juga telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan, pengaturan pemastian produk halal impor diperlukan untuk menghadirkan kepastian halal sekaligus kepastian usaha. "Dengan kata lain, peraturan ini menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan konsumen dan

Regulasi ini diharapkan memberikan manfaat bagi konsumen sekaligus menciptakan kepastian dan nilai tambah bagi dunia usaha."

Ahmad Haikal Hasan
Kepala BPJPH

kepastian bagi dunia usaha," kata Babe Haikal di Gedung BPJPH Jakarta, Sabtu (5/9) lalu.

Bagi masyarakat, pengaturan ini menjadi bagian dari upaya negara memberikan kepastian atas produk halal yang beredar. Bagi pelaku usaha, peraturan memberikan kejelasan dalam memenuhi ketentuan JPH untuk produk yang berasal dari luar negeri.

Menurutnya, pemastian produk halal merupakan bagian dari penyelenggaraan JPH yang berlandaskan prinsip perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi. Serta profesionalitas sebagaimana amanat UU Nomor 33 Tahun 2014. (wan/bas)



Suasana di Bandara Juanda. Imbas Erupsi Anak Krakatau

54 Penerbangan di Bandara Juanda Dibatalkan

Sidoarjo - **HARIAN BANGSA** Sebanyak 54 penerbangan di Bandara Internasional Juanda mengalami pembatalan pada Senin (7/9/2026). Pembatalan itu merupakan dampak berantai dari aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau yang mengganggu operasional sejumlah bandara.

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengatakan, dari 54 penerbangan yang batal, sebanyak 24 di antaranya merupakan penerbangan kedatangan sedangkan 30 lainnya adalah penerbangan keberangkatan. Data itu merupakan kondisi operasional hingga pukul 11.40 WIB.

"Pada tanggal 7 September 2026, berdasarkan kondisi operasional hingga pukul 11.40 WIB, terdapat 54 penerbangan yang mengalami pem-

Forkopimcam Gedangan Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Sidoarjo, Memorandum Forkopimcam Gedangan bersama rombongan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Ketua BUMDes Gemilang melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus proyek percontohan TPS 3R Pelangi di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (5/9).

Kegiatan dihadiri Kapolres Gedangan Kompol Anas Agung Gede Putra Wisnawa, Danramil Gedangan, Camat Gedangan, rombongan Pemprov DKI Jakarta, serta Ketua BUMDes Gemilang.

Sosialisasi ini difokuskan pada pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Langkah itu dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai berbagai metode dan teknologi pengelolaan sampah. Di antaranya pengolahan termal terkendali, Moscare Vortex Wet Scrubber, Eco Lindi, hingga proses daur ulang dan pembuatan kompos.

Melalui penerapan teknologi serta sistem pengelolaan yang tepat, sampah diharapkan tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan. Sampah juga dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (jok/fdn)

Edukasi Bahaya Bullying dan Radikalisme

Sidoarjo, Memorandum Sat Binmas Polresta Sidoarjo mengunjungi SMK YPM 5 Sukodono, Senin (7/9). Kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memberi pemahaman mengenai berbagai persoalan yang rentan terjadi di kalangan remaja.

Dalam penyuluhan tersebut, para pelajar mendapatkan materi terkait kenakalan remaja, bullying, pelecehan seksual hingga bahaya radikalisme. Edukasi ini disampaikan mampu memberikan pemahaman kepada para siswa agar dapat menghindari berbagai perilaku negatif serta berani melaporkan apabila mengobservasi adanya potensi gangguan kamtibmas.

Kegiatan itu dipimpin Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Inggit Prasetyanto, didampingi



Anggota Satbinmas Polresta Sidoarjo memberikan edukasi bahaya bullying dan radikalisme.

Selain itu, para siswa juga diajak untuk turut berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dengan menjadi mitra polisi serta memberikan informasi apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

Antusias para siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui ke-

Bupati Subandi Bantu Kursi Roda untuk Tiga Warga Wonoayu

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Bupati Sidoarjo Subandi SH MKn selalu peduli dan perhatian kepada rakyatnya. Kepada tiga warga Kecamatan Wonoayu yang memerlukan bantuan diserahkan tiga kursi roda. Bupati Subandi berharap penerima bisa beraktivitas lagi ke luar rumah dan mendukung pemulihan kesehatan mereka. Keluarga mereka berterima kasih.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban bagi yang sedang mengalami sakit dan keluarganya," ungkap Bupati Subandi yang rajin menjenguk warganya meski sedang libur kerja di akhir pekan pada Sabtu (5/9/2026).

Ada tiga orang yang mendapatkan bantuan kursi roda. Mereka adalah Rodiyah, 65 tahun, yang sudah 13 tahun sakit akibat stroke. Dia tinggal di Dusun Banar RT.19 RW.9 Desa Pilang. Selain itu, Sampurni, 60 tahun, yang tinggal di Desa Wonokasian.

Dia mengalami kelainan kaki sejak kecil. Tidak bisa jalan. Sampurni juga mengalami sakit di bagian pinggang sehingga butuh perawatan. Ada juga Badriyah, 56 tahun, warga Desa Wonokasian, Wonoayu, yang juga sakit dan sulit berjalan.



Menyaksikan kondisi tiga warga tidak mampu dan sakit tersebut, Bupati Subandi menginstruksikan tenaga dan fasilitas kesehatan untuk selalu memberikan pelayanan dan pendampingan medis secara optimal. Mereka harus dilayani dengan baik. Pastikan terdaftar dalam program BPJS Kesehatan agar terjamin mendapatkan layanan kesehatan

tanpa kendala biaya.

"Sehingga mereka yang sakit dapat perawatan dan bisa kembali beraktivitas di luar rumah. Tidak jenuh terus-menerus berada di dalam rumah," tambah Bupati Subandi.

Bantuan kursi roda dan layanan kesehatan yang baik itu pada akhirnya dapat berkontribusi pada pemulihan kesehatan se-

cara bertahap. Keluarganya juga terbantu dalam merawat yang sakit. "Semoga keluarga diberikan kesabaran untuk merawat dengan baik," ucapnya.

Para penerima bantuan kursi roda mengaku senang atas kepedulian Bupati Subandi dan Pemkab Sidoarjo serta Baznas Sidoarjo. Lebih-lebih mereka juga dapat bantuan sembako. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pansus Dorong Badan Riset Berdiri Mandiri, Masih Kekurangan Tenaga Peneliti

KOTA-Wacana memisahkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengemuka dalam finalisasi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sidoarjo, Senin (7/9).

Pansus III bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo menggelar rapat pembahasan akhir terkait perubahan kedua Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembahasan berlangsung di ruang rapat komisi DPRD Sidoarjo.

Ketua Pansus III DPRD Sidoarjo Supriyono mengatakan, secara umum pembahasan bersama OPD telah mencapai titik final. Tidak banyak lagi persoalan yang mengemuka sebelum rancangan

perubahan perda tersebut dibawa ke rapat paripurna pada Rabu (9/9).

"Hari ini sebenarnya finalisasi pembahasan Pansus, karena hari Rabu besok kita akan melaksanakan rapat paripurna. Secara umum masukan dari teman-teman OPD juga sudah tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan yang kita harapkan," ujarnya.

Namun, dalam rapat tersebut masih muncul sejumlah masukan strategis dari anggota DPRD. Salah satunya terkait kebutuhan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Keberadaan UPT dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah di lapangan.

Selain itu, DPRD juga mengusulkan agar urusan pengairan dipisahkan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber

Daya Air (PU BMSDA) dan kembali menjadi OPD tersendiri.

Supriyono menyebut usulan tersebut muncul karena persoalan pengairan di la-

pangan dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius. (dik/vga)



KABID PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PUBMSDA BERIKAN FOTO PAPAN NAMA DI BAWAH POHON PISANG WARTAWAN MENYUSURI PROYEK BETONISASI



Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pembangunan proyek betonisasi senilai 21 miliar lebih di ruas jalan Bluru Kidul - Sidoklumpuk, Kabid Jalan dan Jembatan PUBMSDA Sidoarjo, Ir Purwanto tunjukkan foto papan nama kecil berada di bawah pohon pisang yang khalayak tidak akan bisa tahu semuanya dan lagi pula tidak tertera secara rinci kegiatan berapa luas jalan yang dibetonisasi. H Purwanto Kabid Jalan dan Jembatan PUBMSDA saat dikonfirmasi wartawan, via WhatsApp, Minggu, 6/9/26, ia terdiam seribu bahasa, tak memberikan jawaban wartawan.

Sementara proyek yang membawa dampak serius masyarakat sekitar, para pebisnis mengatakan lumpuh macat bisnis sekitar nyaris lumpuh total para pebisnis kanan kiri sepanjang proyek betonisasi, kini proyek masuk dalam penyelesaian box culvert kanan kiri jalan dan urusan sudah selesai tinggal ngecor betonisasi.

Sementara dampak kemacetan ekonomi dapat dirasakan masyarakat sekitarnya, ucap Solkan cervice bengkel sepeda motor pada wartawan ya sudah 2 bulan ini bengkel kami terdampak lumpuh total proyek jalan hingga bengkel kami mati total, katanya Minggu, 6/9/26. Begitu pula pebisnis lainnya sama juga merasakan dampak sepiunya akibat pembangunan jalan betonisasi Bluru Kidul - Sidoklumpuk. Sementara untuk memacu pembangunan infrastruktur demi mendorong kualitas pelayanan publik sekaligus menuntaskan persoalan genangan air di sejumlah wilayah strategis.

Salah satu proyek prioritas yang tengah dikebut saat ini adalah peningkatan Jalan Raya Bluru Kidul, senilai 21,444 miliar an yang dikerjakan oleh PT Jakrindo Menganti yang sebenarnya tidak diinginkan oleh bupati mengingat bukan kontraktor lokal. Sedangkan H Purwanto Peningkatan Jalan dan

Jembatan PUBMSDA Sidoarjo kini beri keterangan via WhatsApp, Minggu, 6/9/26 saat dikonfirmasi wartawan siapa yang kerjakan proyek Bluru Kidul - Sidoklumpuk tidak ada azas transparansi publik, Minggu 6/9/26.

Hal ini dibuktikan langsung saat wartawan Pojok Kiri investigasi lokasi tidak ada transparansi publik tentang anggaran proyek tersebut karena tidak dipasang papan nama sesuai amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik pasal 14 thn 2008. Namun Purwanto jawab itu ada papan namanya tanpa memberikan bukti dimanapun papan nama dipasang sebelumnya.

Sedangkan kini proyek beralih ke timur masjid untuk pemasangan box culvert kanan kiri nya masyarakat pebisnis sekitarnya yang padat kini juga merasakan lumpuh nya usaha karena dampak proyek betonisasi, namun bagaimana lagi ia tetap menerima

karena untuk kebaikan jalan, ucap Warsono pedagang makanan.

"Peningkatan Jalan Bluru Kidul ini prioritas utama karena setiap musim hujan kawasan ini selalu tergenang. Akses warga menuju pusat pelayanan jadi lumpuh. Karena itu, penanganannya wajib dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi," ujar Subandi di sela-sela peninjauan. Ia membeberkan, saking mendesaknya proyek ini, Pemkab Sidoarjo bahkan melakukan pengalihan alokasi anggaran (shifting budget) yang semula diplot untuk penanganan jalan dipergunakan untuk betonisasi ini. Sementara dirut Jakrindo yang beralamat di Gresik tidak tampak batang hidung nya guna dikonfirmasi wartawan, sampai berita berseri dirut tidak pernah menampakkan batang hidung sampai proyek pada tahapan gali tanah untuk box culvert sebelah timur masjid Bluru sedang dimulai. (Khol/ Bersambung)

✓ Rumah Pompa Banjarpoh Ditingkatkan Daya Sedot Penahan Tanah Gunakan Besi Bekas

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Sungguh luar biasa peningkatan kapasitas daya sedot pompa Banjarpoh menyedot anggaran 1,6 miliar dari pagu 2 miliar yang dimenangkan CV Jati Jaya dengan Direktur Jono.

Investigasi Kabiro Harian Pojok Kiri, H Abdul Kholiq di lokasi proyek, pekerjaan baru bongkar tembok pembatas perumahan untuk penambahan bangunan rumah pompa, hanya terlihat 2 tukang bangunan dan sekarang ada bego yang mengeruk tanah dan memasang besi bekas untuk menahan tanah.

Sementara Direktur H Jono tidak tampak batang hidung nya dilokasi untuk dikonfirmasi wartawan. Sementara saat dihubungi telpnya H Jono tidak bisa karena no Hp Kabiro Harian Pojok Kiri, H Abdul Kholiq tampaknya



diblokir olehnya.

Sedangkan Hermindo Kabid SDA saat dikonfirmasi wartawan terkait peningkatan daya sedot air yang memakan anggaran APBD fantastis 1,6 miliar, ia memberikan keterangan klasik untuk upaya pemerintah cepat menangani banjir di masyarakat, katanya saat

dikonfirmasi wartawan.

Sementara masyarakat sekitar Ahmad dkk geleng geleng kepala dibuatnya karena hanya menambal bangunan rumah pompa cuma ukuran kecil 2x2 meteran, katanya. Mereka katakan peningkatan kapasitas daya sedot pompa tampaknya sia sia saja kalau sungai

nya penuh juga gak bisa menyedot air banjir di perkampungan, jadi kayaknya buang buang anggaran saja, katanya.

Sementara Untuk peningkatan rumah pompa Sidoarjo 1 dan 2 kelihatan belum mulai yang menyedot anggaran lebih besar, 3 miliar. (Khol/bersambung)



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



TERTIB: Babe Haikal memberikan keterangan soal pemastian produk halal impor di Gedung BPJPH, Jakarta, Sabtu (5/9).

BPJPH

Atur Kepastian Halal Produk Impor untuk Lindungi Konsumen

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2026. Yakni, tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemastian produk halal luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 telah melalui serangkaian pembahasan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penyusunannya juga telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan, pengaturan pemastian produk halal impor diperlukan untuk menghadirkan kepastian halal sekaligus kepastian usaha. "Dengan kata lain, peraturan ini menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan konsumen dan

Regulasi ini diharapkan memberikan manfaat bagi konsumen sekaligus menciptakan kepastian dan nilai tambah bagi dunia usaha."

Ahmad Haikal Hasan
Kepala BPJPH

kepastian bagi dunia usaha," kata Babe Haikal di Gedung BPJPH Jakarta, Sabtu (5/9) lalu.

Bagi masyarakat, pengaturan ini menjadi bagian dari upaya negara memberikan kepastian atas produk halal yang beredar. Bagi pelaku usaha, peraturan memberikan kejelasan dalam memenuhi ketentuan JPH untuk produk yang berasal dari luar negeri.

Menurutnya, pemastian produk halal merupakan bagian dari penyelenggaraan JPH yang berlandaskan prinsip perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi. Serta profesionalitas sebagaimana amanat UU Nomor 33 Tahun 2014. (wan/bas)

Jawa Pos

22 Dapur MBG Tak Punya Sertifikat Higiene Sanitasi

Pemkab Desak Izin Segera Diurus

SIDOARJO - Persoalan perizinan masih membayangi operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Delta. Sebanyak 22 dari 170 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemkab Sidoarjo mendorong pengelola dapur segera melengkapi persyaratan yang masih kurang.

Plh Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman mengatakan, pemkab tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional dapur MBG yang belum mengantongi SLHS. Kewenangan tersebut berada di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instansi yang menangani program MBG.

"Kami tidak bisa menghentikan karena itu kewenangan BGN. Namun, kami mendorong SPPG segera memenuhi persyaratan," katanya kemarin (7/9). Menurut Ainur, pengelola perlu memperhatikan pemenuhan fasilitas sanitasi sebelum proses perizinan dilanjutkan. Setelah fasilitas dinyatakan memenuhi persyaratan, pengelola juga harus melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan SLHS.



KENA SANKSI: SPPG Kalitengah ditutup sementara setelah kasus keracunan massal. Penyaluran MBG dialihkan ke dapur lain.



Jumlah
170 SPPG

Belum berizin
31 SPPG

Belum mengantongi SLHS
22 SPPG

SUMBER: PEMKAB SIDOARJO

Ainur mengatakan, pemkab mendorong seluruh proses perizinan segera dituntaskan. Terkait batas waktu penyelesaian persyaratan, pihaknya masih berkoordinasi dengan BGN. "Kami siap membantu dari sisi pendampingan. Jangan sampai pengelola tidak tahu kekurangannya," ujarnya.

Evaluasi Seluruh SPPG

Di sisi lain, persoalan perizinan SPPG juga menjadi sorotan DPRD Sidoarjo. Dari total 170 SPPG yang beroperasi, sebanyak 31 di antaranya disebut belum mengantongi izin. Pemkab telah mengevaluasi perizinan seluruh SPPG yang beroperasi.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Muchamad Dhamroni Chudlori menilai pengelola

SPPG perlu memberikan penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP), proses produksi, hingga sis-

tem pengawasan keamanan pangan yang diterapkan. DPRD mendesak BGN bersama Satgas SPPG mengevaluasi seluruh dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan.

"Dapur yang masih bermasalah diminta tidak dipakakan beroperasi sebelum memenuhi standar yang ditetapkan," kata Dhamroni. Evaluasi tersebut terutama menyangkut kebersihan dan higienitas dapur, kelayakan fasilitas, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sumber air, peralatan, tenaga pendukung, serta SOP produksi. (ful/hen)



Kami tidak bisa menghentikan karena itu kewenangan BGN. Namun, kami mendorong SPPG segera memenuhi persyaratan."

Mohammad Ainur Rohman
Plh Sekda Sidoarjo



PEMKAB SIDOARJO

Penyaluran Makanan untuk 19 Lembaga Dialihkan

SPPG Kalitengah, Tanggulangin, ditutup setelah keracunan massal di Ponpes Manba'ul Hikam. Pemkab memastikan program MBG untuk 19 lembaga yang sebelumnya disuplai SPPG akan tetap berjalan. Distribusi bakal dialihkan ke dapur MBG lain.

"Rencananya memang dialihkan. Sekarang masih proses komunikasi," kata Plh Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman. Dia menjelaskan pemkab akan mendata kebu-

tuhan MBG di 18 sekolah dan mencocokkannya dengan kapasitas SPPG lain. Langkah itu dilakukan untuk menentukan SPPG pengganti yang bisa menyuplai MBG selama Kalitengah ditutup sementara.

Pengasuh Ponpes Manba'ul Hikam KH Abdul Wahid Harun mengatakan, ada evaluasi terkait MBG setelah keracunan. Dia mengusulkan, program MBG ditangani internal ponpes. "Kami terus pantau, tapi fokus saat ini

biar pembelajaran bisa mulai kembali," katanya

Soal proses hukum, Abdul Wahid mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terlalu mencampuri langkah yang akan ditempuh para alumni. Saat ini yang diprioritaskan adalah pemulihan santri serta keberlangsungan pembelajaran. "Itu (proses hukum) biar nanti anak-anak alumni yang ngurus. Kami punya lawyer banyak," ungkapnya. (ful/eza/hen)

Jawa Pos

Sidoarjo

Jawa Pos • METROPOLIS | SELASA 8 SEPTEMBER TAHUN 2026 | HALAMAN 18



RUSAK:
Petugas PLN
dan Telkom
merapikan
kabel di Jalan
Diponegoro.
Kabel menjuntai
karena tiang
listrik miring.

Kabel Menjuntai di Jalan Diponegoro Jerat Tiga Pemotor

SIDOARJO - Sebanyak tiga pengendara motor terjatuh di Jalan Diponegoro kemarin (7/9). Mereka mengalami kecelakaan akibat terjatuh kabel yang menjuntai. Kabel tersebut melorot setelah tiang milik PLN mengalami kemiringan.

Kasi Layanan, Pengawasan dan Pemeliharaan P3U Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Didik Sudarmanto membenarkan adanya kejadian tersebut. Meski sempat terjatuh, seluruh pengendara dilaporkan dalam kondisi aman. "Kabel ditangani setelah ada

laporan masyarakat," kata Didik. Selain menertibkan kabel, Dishub berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan kondisi tiang dan jaringan kabel di lokasi kembali aman. "Penanganan dilakukan secepatnya mengingat lokasi merupakan jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan," tambah Didik. Menurut dia, petugas telah menata tiang listrik dan kabel. Tidak ada lagi jaringan yang melintang di jalan. Sebagai langkah antisipasi, petugas juga mengecek kondisi tiang listrik lainnya. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Forkopimcam Gedangan Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Sidoarjo, Memorandum
Forkopimcam Gedangan bersama rombongan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Ketua BUMDes Gemilang melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus proyek percontohan TPS 3R Pelangi di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (5/9).

Kegiatan dihadiri Kapolsek Gedangan Kompol Anak Agung Gede Putra Wisnawa, Danramil Gedangan, Camat Gedangan, rombongan

Pemprov DKI Jakarta, serta Ketua BUMDes Gemilang.

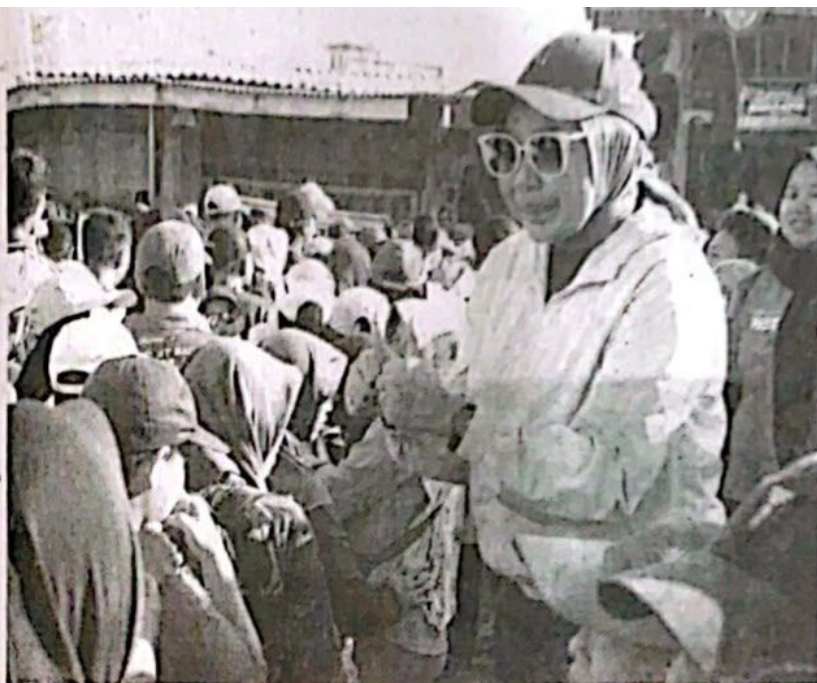
Sosialisasi ini difokuskan pada pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Langkah itu dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai berbagai metode dan teknologi pengelolaan

sampah. Di antaranya pengolahan termal terkendali, Moscare Vortex Wet Scrubber, Eco Lindi, hingga proses daur ulang dan pembuatan kompos.

Melalui penerapan teknologi serta sistem pengelolaan yang tepat, sampah diharapkan tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan. Sampah juga dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (jok/fdn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELAJAR TANPA AIR



Sriatun melepas peserta jalan sehat.

Jalan Sehat Desa Pabean Berhadiah Umrah

Sidoarjo, Memorandum

Ribuan warga Desa Pabean, Kecamatan Sedati, memadati lapangan desa setempat, Minggu (6/9). Mereka berduyun-duyun datang mengikuti gebyar jalan sehat dan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Hadiah utamanya paket umrah, 1 unit motor matik dan dua unit sepeda listrik.

Jalan sehat diberangkatkan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sidoarjo Sriatun Subandi. Ribuan peserta menyambungnya dengan gembira. Mereka berbaris dalam kegiatan yang disambut antusias ribuan peserta tersebut.

Istri Bupati Sidoarjo Subandi ini mengapresiasi positif pelaksanaan kegiatan itu. Manfaatnya baik untuk semua. "Kegiatan jalan sehat ini akan memperkuat silaturahmi antarwarga dan menjaga kesehatan tubuh," ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan

RI menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Selain itu, memupuk semangat gotong royong. Semua masyarakat terlibat dalam kegiatan di Desa Pabean.

Warga terlihat gembira dan kompak memeriahkan jalan sehat yang menyenangkan tersebut. "Berbagai kegiatan yang dilakukan hari ini akan meningkatkan keguyuban dan kekompakan warga Desa Pabean," jelas Sriatun Subandi.

Ibu dua anak tersebut berpesan, kekompakan dan keguyuban masyarakat sangat penting demi mendukung pembangunan. Hal itu adalah fondasi utama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dia mengajak seluruh warga untuk selalu menjaga kesehatan, kerukunan, dan kekompakan. "Pembangunan fisik atau sosial akan sulit berjalan lancar tanpa ada kebersamaan," tandasnya. (sud/jok/fdn)



Suasana di Bandara Juanda.

Imbas Erupsi Anak Krakatau

54 Penerbangan di Bandara Juanda Dibatalkan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA Sebanyak 54 penerbangan di Bandara Internasional Juanda mengalami pembatalan pada Senin (7/9/2026). Pembatalan itu merupakan dampak berantai dari aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau yang mengganggu operasional sejumlah bandara.

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengatakan dari 54 penerbangan yang batal, sebanyak 24 di antaranya merupakan penerbangan kedatangan sedangkan 30 lainnya adalah penerbangan keberangkatan. Data itu merupakan kondisi operasional hingga pukul 11.40 WIB.

“Pada tanggal 7 September 2026, berdasarkan kondisi operasional hingga pukul 11.40 WIB, terdapat 54 penerbangan yang mengalami pem-

batalan dengan rincian 24 kedatangan dan 30 keberangkatan,” kata Tohir dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Tohir menjelaskan bahwa pembatalan itu tidak terlepas dari gangguan operasional di sejumlah bandara akibat dampak abu vulkanik dari aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau.

Hingga Senin siang, ada 4 bandara yang masih mengalami penutupan operasional. Keempatnya yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II, dan Bandara Husein Sastranegara.

Penutupan sejumlah bandara itu turut berdampak terhadap konektivitas dan rotasi penerbangan termasuk sebagian penerbangan yang beroperasi melalui Bandara Juanda. Di tengah kondisi itulah Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan maskapai serta seluruh stakeholder terkait. Hal itu

dilakukan untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik.

Juanda juga tetap membuka layanan penerbangan selama 24 jam sebagai salah satu bandara alternatif untuk mendukung kelancaran operasional dan konektivitas penerbangan. “Sebagai salah satu bandara alternatif, Bandara Internasional Juanda akan melayani penerbangan selama 24 jam guna mendukung kelancaran operasional penerbangan dan konektivitas pengguna jasa selama berlangsungnya kondisi ini,” jelas Tohir.

Bagi penumpang yang terdampak, pihak Juanda memberikan Service Recovery Activation berupa makanan ringan dan minuman. Personel Airport Security, Terminal Inspector, serta Customer Service juga disiagakan untuk membantu memberikan informasi dan mengarahkan penumpang selama berada di terminal. (md/rus)

Perketat Pengawasan Pelayanan Puskesmas

SIDOARJO, SURYA - Datang ke puskesmas untuk berobat, tentu warga berharap mendapat pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman. Pasalnya, puskesmas adalah pintu pertama untuk memperoleh layanan kesehatan.

Pemkab Sidoarjo memperketat pengawasan terhadap kualitas pelayanan di seluruh puskesmas. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dan garda terdepan pelayanan masyarakat, puskesmas dituntut lebih responsif, inklusif, serta tidak membedakan pasien, termasuk saat menghadapi keluhan dan komplain warga.

Bupati Sidoarjo, Subandi, puskesmas merupakan cerminan langsung dari kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga. Standar tata kelola pelayanan hingga penanganan aduan masyarakat harus dibenahi secara menyeluruh.

"Puskesmas ini mewakili pemerintah. Kalau ada komplain, sikap kita melayani, bukan mengajak bertengkar. Berikan jawaban yang santun. Sebagai birokrat, tidak boleh emosional," ujar Subandi, Senin (7/9).

Hal itu juga telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuwantina serta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo dalam pertemuan beberapa hari lalu.

Bupati Subandi meminta seluruh puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Layanan harus dilakukan secara optimal dan tidak membedakan masyarakat. Setiap keluhan warga juga harus diterima dan ditangani dengan sikap yang santun.

Subandi juga meminta jajaran Dinas Kesehatan menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas. Menurut dia, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada kepala dinas atau pejabat struktural, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pegawai.

"Kunci kesuksesan ini tidak hanya di tangan Kadinkes, bukan di tangan sekretaris, bukan di tangan kabid-kabid, kasubag, kuncinya ada pada kebersamaan," ujarnya.

Selain peningkatan kualitas layanan, Subandi menyoroti kondisi fasilitas dan peralatan di seluruh puskesmas. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kata dia, akan memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang masih kurang.

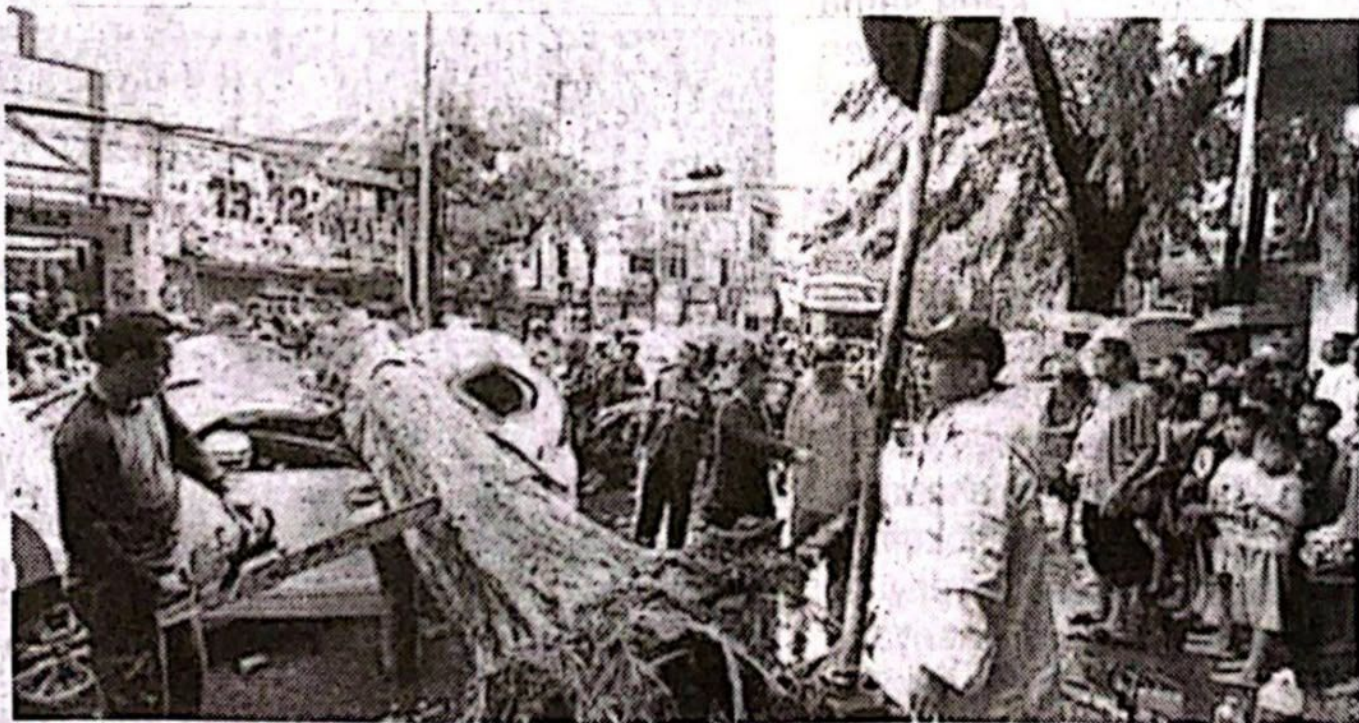
Subandi meminta Dinas Kesehatan melakukan pengecekan terhadap 31 puskesmas yang ada di Sidoarjo. Kekurangan fasilitas maupun peralatan di setiap puskesmas diminta segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. (ufi)

DLHK Sidoarjo Banyak Terima Pengaduan Pengeprasan Pohon

Sidoarjo, Bhirawa

Masyarakat Kabupaten Sidoarjo diminta segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, apabila melihat di sekitarnya ada pohon yang akarnya keropos, batang miring, dan banyak cabang di pinggir jalan raya. "Karena pohon seperti itu berpotensi roboh dan dikhawatirkan menimpa orang di sekitarnya," kata Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono SSTP MAP, belum lama ini.

Laporan penanganan pohon untuk bisa dipotong maupun sekedar dikepras saja, kepada DLHK Sidoarjo, kata Arif, banyak sekali. Mulai warga, pihak desa sampai kecamatan. Arif menegaskan silakan saja warga warga Sidoarjo melaporkan, karena itu sebagai bentuk pelayanan publik. Dan yang terpenting, pelayanan itu gratis tidak dipungut biaya sama sekali. DLHK Sidoarjo akan segera menurunkan tim kepras untuk melakukan pemeliharaan dan perapian pohon. Ada dua tim kepras yang dilengkapi kendaraan skylift dan truk angkut. [kus.ca]



alikusyanto/bhirawa.

Petugas melakukan pemotongan pohon, pada sebuah pohon tumbang di tengah kota Sidoarjo menimpa sebuah kendaraan roda 4.



JADWAL PENERBANGAN: Calon penumpang memadati area keberangkatan di Bandara Juanda di Sidoarjo.

12 Penerbangan di Bandara Juanda Dibatalkan Akibat Erupsi Anak Gunung Krakatau

SEDATI-Aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap operasional sejumlah bandara. Kondisi ini turut berimbas pada konektivitas dan rotasi penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Hingga Senin (7/9) pukul 09.30 WIB, tercatat sebanyak 12 penerbangan di Bandara Juanda mengalami pembatalan atau cancel flight. Rinciannya, lima penerbangan kedatangan dan tujuh penerbangan keberangkatan.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, pembatalan penerbangan tersebut merupakan dampak berantai dari penutupan operasional sejumlah bandara akibat aktivitas erupsi

Anak Gunung Krakatau.

"Sehubungan dengan aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau yang berdampak pada operasional sejumlah bandara di sekitar wilayah tersebut, hingga

● Ke Halaman 10



12 Penerbangan...

Senin terdapat empat bandara yang masih mengalami penutupan operasional," kata Muhammad Tohir. Keempat bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II, dan Bandara Husein Sastranegara.

Di Bandara Juanda, penerbangan kedatangan yang dibatalkan di antaranya Batik Air 7511 rute Halim Per-

danakusuma-Juanda, Garuda Indonesia 304 dan Batik Air 6572 rute Soekarno-Hatta-Juanda, Batik Air 7513 rute Halim Perdanakusuma-Juanda, serta Lion Air 690 rute Soekarno-Hatta-Juanda.

Sementara penerbangan keberangkatan yang dibatalkan yakni Batik Air 6391 dan Batik Air 7508, Garuda Indonesia 305, Batik Air 7510, Lion Air 693, Garuda Indonesia 323, serta Batik Air 6573.

Tohir menyampaikan, pihaknya terus melakukan pemantauan kondisi operasional dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait.

"Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi secara intensif bersama maskapai serta seluruh stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal," ujarnya. (sur/vga)





DIKRY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

DILANJUTKAN: Frontage Road Sidoarjo segera digarap bulan depan.

Frontage Road Buduran Kembali Digarap Oktober

SETELAH sempat terhambat bangunan yang memutus trase jalan, proyek lanjutan Frontage Road (FR) ruas Buduran segera kembali berjalan. Pemkab Sidoarjo memastikan pembangunan jalan penyangga tersebut mulai dikerjakan Oktober mendatang, dengan target sudah tersambung hingga arah Sidoarjo pada awal Desember 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan tahapan sebelum pekerjaan fisik dimulai.

Salah satunya memastikan bangunan yang berada di jalur pembangunan di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, sudah dikosongkan.

“Pembangunan akan diawali dari jalan yang sudah eksisting di sisi utara Jalan Antartika menuju

● Ke Halaman 10

Frontage Road...

Jalan Raya Jenggolo. Panjang yang akan dibangun sekitar 70 meter,” ujar Makhmud, Senin (7/9).

Menurutnya, ruas yang akan dibangun berada di sisi utara Jalan Antartika, tepat di depan Gedung Al Khoziny baru. Dari titik tersebut, jalan akan diarahkan menuju kawasan SMKN 1 Buduran hingga tersambung dengan Jalan Raya Jenggolo.

Makhmud menyebut, pembangunan fisik ditargetkan mulai dieksekusi pada Oktober. Sementara, proses pengosongan bangunan yang menghalangi trase jalan ditargetkan rampung akhir September.

“Kalau bulan depan (Oktober, red) eksekusi, InsyaAllah targetnya awal Desember sudah bisa tersambung dari Waru sementara ini sampai ke Sidoarjo,” katanya.

Dalam pembangunan tersebut,

Pemkab Sidoarjo juga memastikan keberadaan JPL (Jalur Perlintasan Langsung) 55 di Jalan Raya Jenggolo tidak akan digeser. Rekayasa trase dilakukan dengan menggeser badan jalan sedikit ke arah timur.

Akibat rekayasa tersebut, jalur FR nantinya akan dibuat sedikit berbelok sebelum masuk ke Jalan Raya Jenggolo. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu jalur perlintasan yang sudah ada.

“Pembangunan tidak akan menggeser jalur JPL 55 di Jalan Raya Jenggolo. Rekayasa dilakukan dengan menggeser jalan sedikit ke timur. Jadi jalurnya nanti agak berbelok sebelum masuk ke Jalan Jenggolo,” jelasnya.

Untuk merealisasikan penyambungan ruas tersebut, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,7 miliar pada tahun 2026. (dik/vga)

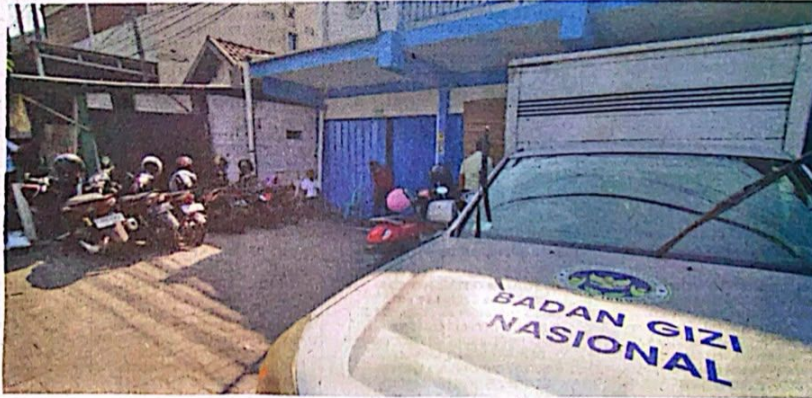
Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam Serahkan Jalur Hukum ke Alumni

Kasus Keracunan MBG

TANGGULANGIN-Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, KH Abdul Wahid Harun, menyerahkan sepenuhnya langkah hukum terkait dugaan keracunan massal yang dialami ratusan santri kepada para alumni pesantren.

KH Abdul Wahid menegaskan, pihak pondok tidak akan mengambil langkah hukum secara langsung. Ia memilih tetap fokus pada kegiatan pembelajaran di pesantren serta komunikasi dengan para wali santri.

"Itu biar anak-anak alumni yang mengurus. Kami punya lawyer banyak," ujar KH Abdul Wahid saat ditemui di



TAK BEROPERASI: SPPG di Kalitengah saat ini ditutup sementara.

Ponpes Manbaul Hikam.

Menurutnya, para alumni memiliki kedudukan dan

rasa memiliki terhadap pesantren. Karena itu, mereka diberi ruang untuk berkoor-

dinasi dan menentukan langkah terbaik yang perlu dilakukan terkait persoalan

tersebut. "Biar anak-anak yang di sana apa yang terbaik, seperti apa," katanya.

Saat ditanya apakah pihak pesantren akan membuat laporan kepada kepolisian terkait dugaan keracunan yang menimpa para santri, KH Abdul Wahid kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut diserahkan kepada para alumni.

"Sudah, biar mereka yang urus. Saya enggak, enggak nyuruh apa-apa. Biar mereka kolaborasi sendiri mana yang terbaik," jelasnya.

Ia mengatakan, para alumni merasa memiliki ikatan kuat dengan Ponpes Manbaul Hikam. Karena itu, pihaknya tidak ingin mengarahkan mereka dalam menentukan langkah

● Ke Halaman 10

Pengasuh Ponpes...

yang akan ditempuh.

"Mereka kan merasa memiliki toh, ini pondok kita," ucapnya. Di sisi lain, KH Abdul Wahid menyebut dirinya memilih berkonsentrasi pada proses pembelajaran di lingkungan pesantren. Selain itu, komunikasi dengan para wali santri juga menjadi perhatian utama setelah ra-

tusan santri mengalami dugaan keracunan usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, dugaan keracunan massal terjadi di Ponpes Manbaul Hikam setelah para santri mengonsumsi makanan program MBG. Makanan tersebut diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan

Tanggulangin.

Peristiwa tersebut membuat ratusan santri harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di Sidoarjo. Pemerintah dan sejumlah instansi terkait kemudian melakukan penanganan serta pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Edukasi Bahaya Bullying dan Radikalisme

Sidoarjo, Memorandum

Sat Binmas Polresta Sidoarjo mengunjungi SMK YPM 5 Sukodono, Senin (7/9). Kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memberi pemahaman mengenai berbagai persoalan yang rentan terjadi di kalangan remaja.

Dalam penyuluhan tersebut, para pelajar mendapatkan materi terkait kenakalan remaja, bullying, pelecehan seksual hingga bahaya radikalisme. Edukasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para siswa agar dapat menghindari berbagai perilaku negatif serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

Kegiatan itu dipimpin Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Inggit Prasetyanto, didampingi

Ps. Kanit Bhabinkamtibmas Ipda Hengki Nugroho, Kanit Binmas Polsek Sukodono Aiptu Nur Budi, anggota Satbinmas Polresta Sidoarjo serta anggota Polsek Sukodono.

Kompol Inggit Prasetyanto mengatakan, pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar merupakan salah satu langkah preventif Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Melalui kegiatan ini, para pelajar diharapkan memiliki kesadaran hu-

kum yang baik, mampu menjauhi perilaku kenakalan remaja serta tidak melakukan tindakan perundungan maupun terlibat dalam penyebaran paham yang dapat membahayakan diri sendiri dan lingkungan," jelas Inggit.

Selain itu, para siswa juga diajak untuk turut berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dengan menjadi mitra Polri serta memberikan informasi apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

Antusias para siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kea-

manan dan ketertiban. Melalui ke-



Anggota Satbinmas Polresta Sidoarjo memberikan edukasi bahaya bullying dan radikalisme.

giatan ini juga semakin mempererat hubungan antara Polri,

pihak sekolah dan masyarakat. (sud/jok/fdn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR